

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

A. Lembaga Perkreditan Desa di Bali

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada masing-masing desa adat atau desa pakraman di Bali dirintis oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali pada tahun 1984, perkembangan jumlah LPD dari tahun ke tahun. Awalnya, tahun 1984, hanya ada 8 LPD di Bali. Selanjutnya, tahun 1985 (24 LPD), tahun 1986 (71 LPD). Empat tahun kemudian, tahun 1990, jumlah LPD membengkak menjadi 341 LPD. Jumlahnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 1995, sudah terdapat 849 LPD, tahun 2000 (930 LPD), tahun 2005 (1.304 LPD), tahun 2015 (1.423 LPD), dan pada tahun 2016 total LPD di Bali mencapai 1.433 LPD. Pendirian LPD sejak awal dimaksudkan oleh para perintisnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan perekonomian warga desa pakraman.

63

LPD menjadi alternatif yang sangat membantu karena memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan lembaga keuangan formal, yaitu:

1. Pemberian kredit/pinjaman diprioritaskan bagi masyarakat ekonomi lemah sebagai modal usaha,
2. Bunga pinjaman ringan (termasuk pinjaman lunak),
3. Jangka waktu pengembalian 1-5 tahun tergantung besar kecilnya pinjaman, dengan system bunga menurun,

⁶³ Darsana, 2010, *Lembaga Perkreditan Desa Bali*, Bali, Hlm 2

4. Untuk pinjaman dalam jumlah tertentu dapat diajukan tanpa agunan/barang jaminan,
5. Bagi yang belum/tidak memiliki KTP Bali dapat mengajukan kredit/pinjaman dengan KIPEM dan pernyataan jaminan dari Kelian Banjar tempat dia menetap selama di Bali,
6. Tidak dikenakan biaya administrasi,
7. Prosesnya cepat.

Sampai saat ini lembaga yang masih berdiri dan berkembang tanpa beralih menjadi Bank Perkreditan Rakyat yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang mana lembaga ini LPD sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang pesat di Provinsi Bali, Pada awalnya keberadaan dan aktivitas LPD diatur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 tertanggal 1 November 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali.

Peraturan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPD, ada perubahan lagi yaitu dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Terakhir yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yaitu :

(1) LPD mempunyai hak untuk mendapat pembinaan dan menjalankan operasional LPD.

(2) LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai awig - awig, Pararem Desa dan Peraturan Daerah ini. ”⁶⁴

Selain berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali, keberadaan dan aktivitas LPD juga diatur berdasarkan awig-awig dan/atau pararem yang hanya berlaku pada desa pakraman setempat. Yang mana menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yaitu :

“Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh karma desa pakraman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa pakramanAianjar pakraman masing-masing. ”⁶⁵

Lembaga Perkreditan Desa diadopsi dari Lumbung Pitih Nagari, sebuah Lembaga Keuangan Adat diSumatra Barat yang dikelola berdasarkan syariah Islam (Hukum Islam) .Lembaga Keuangan ini tidak hanya memiliki fungsi sebagai Lembaga Keuangan Adat yang merupakan salah satu bentuk aktualisasi kerukunan masyarakat adatnya saja, namun juga bertujuan untuk menciptakan suatu system perekonomian yang dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Begitu pula dengan LPD di Bali. Keberadaannya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Hindu sebagai agama mayoritas penduduknya, dimana telah menyatu

⁶⁴ Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017

⁶⁵ Pasal 1 ayat 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman

dalam kehidupan mereka sebagai suatu adat dan budaya yang selalu dilestarikan hingga kini.

Lembaga Perkreditan Desa sendiri menurut Perda Provinsi Bali yaitu :

*“Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman.”*⁶⁶

Pada dasarnya adanya LPD untuk pembangunan di tiap – tiap desa adat atau desa pakraman sebagai kekuatan untuk menjaga adat dan budaya Bali yang merupakan suatu strategi baru dalam meningkatkan sumber pendanaan khususnya terhadap anggota masyarakat setempat. Desa pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.⁶⁷

Awig-awig dan/atau pararem dimaksud dibuat oleh desa pakraman setempat dengan didampingi dan dibina oleh tim pembina penulisan awig-awig dari Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Walaupun demikian, substansi awig-awig dan/atau pararem tentang LPD bagi satu desa pakraman tidaklah persis sama dengan awig-awig dan/atau pararem

⁶⁶ Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa

⁶⁷ I Gede Made Gandhi Dwinata, *Eksistensi lembaga perkreditan desa setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro*, Hukum Bisnis Fakultas, Hukum Universitas Udayana.

desa pakraman lainnya. Hal ini memang dimungkinkan sesuai dengan asas desa mawacara (membuat awig-awig dan/atau pararem yang sesuai dengan kondisi dan situasi desa pakraman setempat). Hal ini menandakan bahwa keberadaan dan aktivitas LPD belum diatur berdasarkan awig-awig dan/atau pararem atau hukum adat Bali sebagai satu kesatuan sistem hukum yang berlaku sama di seluruh Bali.

Di Provinsi Bali terdapat istilah dua desa yaitu desa dinas dengan desa pakraman atau desa adat yang dimaksudkan dengan istilah “pemerintahan desa dinas” disini adalah apa yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda dahulu oleh Hunger disebut “Gouvernementsdesa” yang artinya desa pemerintahan.

Desa dinas adalah organisasi pemerintahan di desa yang menyelenggarakan fungsi administrative, seperti mengurus kartu tanda penduduk, dan lain-lain persoalan kedinasan (pemerintahan). Desa dinas dibentuk dengan jalan menggabungkan beberapa desa pakraman kecil menjadi satu, sedangkan desa pakraman yang relatif besar besar, langsung "dibaliknama" menjadi desa dinas.⁶⁸

Undang-undang yang mengatur desa dinas adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125; TLNRI No 4437) sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-

⁶⁸ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006, Hlm

undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548).

Pengertian pemerintahan desa kemudian dirumuskan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut:

*“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*⁶⁹

Sedangkan yang dimaksud desa pakraman ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagai berikut:

*“Desa pakraman adalah “kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”*⁷⁰

Sebuah desa pakraman, terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. unsur parahyangan (berupa pura atau tempat suci agama Hindu)
2. unsur pawongan (warga desa yang beragama Hindu)
3. unsur palemahan (wilayah desa yang berupa karang ayahan desa dan karang guna kaya).

Desa Pakraman Mempunyai mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. *“membuat awig-awig;*

⁶⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁷⁰ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman

- b. mengatur krama desa;*
- c. mengatur pengelolaan harta kekayaan desa;*
- d. bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan;*
- e. membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan "paras-paros, sagilik- saguluk, salunglung-sabayantaka" (musyawarah- mufakat);*
- f. mengayomi krama desa".⁷¹*

Pertama – tama diadakan rapat desa yang disatu pihak bertujuan minta persetujuan krama untuk kepanitia an yang disertai mandat menampung dan merumuskan substansial awig-awig, Dilain pihak masukan-masukan permasalahan sebagai bahan untuk dibahas dicarikan jalan keluarnya dalam formulasi pasal awig-awig kepada panitia yang dibentuk. Panitia sebagai wakil dan mendapat mandat dari krama (anggota) terdiri dari ;

1. Prajuru (bendesa/kelihan desa beserta stafnya ditambah kelihan
2. kelihan banjar/tempek sebagai wakil krama banjar/tempekan).
3. Tokoh -tokoh yang mengetahui adat dan agama (seperti mantan pengurus termasuk generasi muda yang berkecimpung dalam adat dan agama).

⁷¹ Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nornor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman

4. Aparat formal sebagai pengemban misi dharma negara, dari kepala dusun/lingkungan sampai kepala desa/lurah sebagai saksi (mungkin penasehat) sehingga tereliminir formulasi-formulasi substansial awig
5. awig yang bertentangan dengan dasar dan tujuan.

Kepanitiaan tersebut demi profesionalisasinya juga terbagi menjadi paling sedikit tiga bidang, meliputi; tata pakraman (tertib persekutuan), tata agama (tertib pelaksanaan ibadah dan agama), tata pawongan (tertib perorangan) dan mungkin ditambah dengan wicara lan pamidanda (tentang ketentuan kasus dan upaya pemulihannya). Keduaraapat-rapat panitia, yang juga dapat dibedakan antara rapat pleno dan rapat bidang-bidang (seksiseksi). Disinilah pada umumnya mengurus energi kalau betul-betul ingin mewariskan aturan yang objektif dan luhur kepada anak cucu dari pada pakraman. Oleh karena mereka mencari solusi kendala yang dihadapi sekarang berdasarkan dan dimasa yang akan datang. Setelah melalui perdebatan yang menegangkan (dengan istilah roang musuhin; berani mengambil resiko bila melanggar atas ketentuan yang dibuat). Dalam rapat-rapat bidang/seksi selanjutnya diplenokan untuk mendapat penyempurnaan di seksi/bidang yang lainnya, demikian sebaiknya. Dalam situasi inilah pembinaan dari berbagai instansi harusnya mengambil peran memberikan pembahasan jika menemui jalan buntu. Setidak-tidaknya panitia dari aparat formal bisa mengingatkan kedar dan tujuan dari pada awig-awig, dan selanjutnya dapat mengkonlsultasikan kepada instansi terkait. Dengan selesainya sidang pleno panitia, maka dapatlah diformulasikan Rencana

Awig-Awig (RAA) bandingkan dengan negara RUU, yang sebelum dimintakan pengesahan dalam sangkepan Desa dapat dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.

Aparat formal yang duduk pada kepanitiaan sering kurang mampu dalam hal-hal historis, filosofis, religius, yuridis termasuk kebahasaan, seperti :

1. Tentang historis (sejarah/peristiwa) hak dan kewajiban,serta situasi yang mereka warisi dari rentang waktu yang amat panjang dibandingkan usianya, perlu mendapat penjelasan tidak hanya dari tetua/tokoh sedesanya, sesama anggota panitia, tetapi juga pihak luar sebagai konsultan (bahkan sangat ideal kalau mungkin dengan sejarawan).
2. Dari filosofis/Tattwa atau maknawi situasi desa serta hak dan kewajiban, akibat rentang waktu dan disiplin keilmuan yang tidak memadai mutlak membutuhkan konsultan.
3. Mengenai religius Hinduistik (keyakinan terhadap ajaran agama Hindu) yang telah mengakar dalam adat-istiadat, rupanya perlu dibedah kembali sehingga tampak benang merahnya dengan sastra agama (Weda) dari agamawan. Hal ini untuk mengantisipasi penyalah tafsiran terhadap hal-hal yang menyangkut keagamaan.
4. Dari segi yuridis, yang menyangkut sistematika, keterkaitan antara masing-masing pawos serta konsistensinya, rupanya kurang dihayati. Akibatnya sangat fatal misalnya pengenaan penanjung batu bagi krama yang dianggap orang luar. Hal ini karena tidak disistimatisasikan dengan ketentuan yang melandasi awig-awig yakni Pancasila dan UUD 1945

serta Agama Hindu, maka dipungutlah jutaan rupiah untuk penanjung batu yang sebenarnya justru bertentangan dengan makna penanjung batu itu sendiri. Sebenarnya pengertian penanjung batu adalah biaya pengganti “paleletehan” (keadaan yang tidak suci akibat adanya penguburan mayat). Kesistematiskan dan kekonsistenan ini perlu dikonsultasikan ke bagian hukum Kabupaten/Kodya setempat. Sedangkan substansinya sesuai dengan masalahnya seperti “leteh” bidang keagamaan, sedang kesepekang bidang kemasyarakatan.

5. Mengenai peruntutan bidang sistematikanya sebagai berikut :
Murdha Citta sebagai pembukaan, dengan batang tubuh terdiri dari 8 (delapan) Sargah (Bab).

Sargah kemungkinan terbagi lagi menjadi palet-palet, yang kemudian dibagi lagi menjadi Kaping. Kaping ini kemudian dipecah lagi menjadi pawos - pawos yang mencakup wiwit (ayat) dengan sub-sub ayat. (Bandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari bab, sub Bab, atau bagian-bagian seperti pasal-pasal dengan ayat-ayatnya serta rincian dari ayat-ayat tersebut).

Tentang kebahasaan dapat ditinjau dari penulisan aksara, bentukan kata, maupun tunggalan maknanya (tidak rancu/konsisten). Adapun aksara yang dipakai meliputi aksara Bali dan latin, dengan kata-kata sastra kalimatnya disamping mempergunakan bahasa Bali halus, juga memakai bahasa Jawa Kuno (kawi) termasuk, sanskerta, mengenai ketunggalan makna termasuk

kesisteman dan konsistensi terkait dengan bahasa hukum serta perlu dirujuk kepada

akhli hukum, disamping ahli bahasa. Demikianlah kata-kata sesuai dengan kedudukannya (manut linggihnyane) diperdebatkan oleh panitia penyusunan awig-awig desa, seperti terminologi kata untuk kata “meninggal” yang mana di antara kata padem, seda, mati, lacur atau kelayu sekaran yang disepakati? Jika seda atau kelayu-sekaran terlalu halus, sebaliknya padem, lacur apalagi mati dianggap kasar, maka derseption bahasa agama dari bahasa Sansekerta lina (inilah suatu metode generalisasi yang tidak membedakan status krama, yang merupakan salah satu prototipe generalisasi pola penyusunan awig-awig sebagai induknya). Yang tidak kalah penting yakni peruntukan sistematika perincian pawos (Pasal) menjadi wiwit (ayat) dengan sub-subnya “ha, na, ca, ra, ka”. Ada anggapan kenapa justru berbeda dengan bahasa lisan? Disinilah hendaknya dikembalikan kepada tujuan bahasa itu disuratkan, yang tiada lain kesusasteraan hukum, bukan prosa atau puisi, termasuk rasa bahasa yang konsisten dimana induknya dengan budaya daerah otomatis rantingnya harus mencerminkan pula, sehingga tidaklah mungkin “ha, na, ca, ra, ka” itu ditulis dengan a. b. e. d.

Ketiga, rapat desa pengesahan awig-awig. Dengan selesainya Rancangan Awig-Awig dari panitia serta telah mendapat penyempurnaan dari pihak yang berwenang maka tibalah saatnya pada hari yang baik (subha dewasa) diselenggarakan rapat (paruman/sangkepan) desa untuk menyepakati Rancangan Awig-Awig menjadi Awig-Awig. Sebelum disahkan, awig-awig

tersebut dibacakan kembali terutama hal-hal yang prinsip untuk mendapatkan tanggapan krama, apakah mereka menyetujui atau tidak. Jika belum mungkin ditransformasikan ke dalam aturan peralihan sehingga tertampung keimanan mereka, dengan redaksi "Sakaluring sane durung kasuratang ring awig-awig puniki kanton kamanggehang mamargi kadulurin awig-awig puniki kanton kamanggehang mamargi kadulurin antuk pararem-pararem". (artinya segala sesuatu yang belum ditulis dalam awig-awig ini tetap berlaku didasari dengan hasil musyawarah). Seperti soal salah pati, dimana salah satu redaksional Pawos (pasal) tentang meninggal tidak wajar akibat kecelakaan atau bunuh diri (salah Pati ulah pati) diprasyaratkan harus dibawa pulang dan diupacarai sebagaimana biasa. Setelah dimintai persetujuan beberapa kali dengan berbagai penjelasan, ternyata krama semuanya diam tidak memberikan tanggapan, maka panitia dengan pertimbangan dengan team akhirnya mencoret rancangan redaksi tersebut dengan menyiratkannya kedalam aturan peralihan di atas. Sedangkan terhadap yang lain-lain sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Awig-Awig mendapat kesepakatan. Dengan menampilkan prajuru sebagai penanda tangan mewakili kramanya dan tanda tangan aparat formal sebagai saksi serta pengukuhan dari kepala wilayah (Bupati/Wali Kota). Dari proses tersebut maka sahlah awig-awig yang disuratkan dengan pararem krama melalui pesangkepan, kendatipun mungkin pengukuhan Bupati dikemudian hari atau mungkin bersamaan dengan "pemasupatian" setelah disuratkan kedaun lontar

Kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa sendiri menjadi tidak menentu disebabkan oleh adanya perubahan atau perkembangan situasi dan kondisi di luar desa pakraman dengan adanya dua undang-undang yang di buat pemerintah khususnya untuk lembaga keuangan di desa dengan ketentuan berbeda antara lain yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang intinya mengatur Lembaga Perkreditan Desa Harus berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Pada tanggal 8 Januari 2013 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM) yang mengakui keberadaan LPD sebagai lembaga perkreditan milik adat. Keluarnya Undang Undang LKM ini perlu mendapat perhatian semua pihak secara lebih serius dalam usaha mempertahankan keberadaan dan aktivitas LPD sebagai salah satu duwe desa pakraman.⁷²

Undang-undang LKM ini memberi ruang yang cukup kondusif bagi keberadaan dan aktivitas LPD, tetapi di sisi lain pihak ada beberapa hal yang justru menempatkan LPD pada posisi harus membenahi diri dengan sistem yang sesuai. Keharusan bagi LPD untuk berbenah ini patut mendapat perhatian serius, baik oleh Pemerintah Provinsi Bali (beserta segenap jajarannya yang telah berjasa dalam merintis, membina, dan membesarkan LPD), oleh desa pakraman maupun oleh MDP Bali sebagai wadah tunggal desa pakraman di Bali.⁷³

⁷² I Gede Pitana, 1993, *Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali Sebuah Canangsari*, Upada Sastra, Denpasar, Hlm 98

⁷³ Sumarta I Ketut, 2014, *Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali*, Majelis Desa Pakraman Bali, Denpasar, Hlm 7

B. Lembaga Perkreditan Desa Menurut Peraturan Perundang-undangan

Salah satu lembaga yang bergerak untuk mengentas kesulitan di desa dan di bentuk oleh masyarakat desa itu sendiri salah satunya yaitu Lembaga Perkreditan Desa yang mana LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa adat dan melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa adat. LPD merupakan salah satu aset dan sumber pendapatan desa adat sehingga memerlukan pengelolaan yang baik oleh pengurus dan badan pengawas. Secara umum LPD bertujuan meningkatkan taraf hidup warga desa serta melestarikan keberadaan desa adat. LPD menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha - usaha pemupukan modal. Mengingat pentingnya LPD dalam menjangkau perekonomian masyarakat desa maka LPD perlu mendapatkan perhatian lebih dari semua lapisan masyarakat terkait dengan

1. Lembaga Perkreditan Desa Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

LPD sebagai lembaga yang memiliki sifat khusus yakni hanya melayani masyarakat desa pakraman maka dengan berdasarkan konstitusional pada Pasal 18A, 18B dan Pasal 28i Undang - undang Dasar 1945, yang memuat ketentuan bahwa ;

“Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan ke-khususan dan keragaman daerah.

- (2) *Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

Pasal 18B

- (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”⁷⁴*

Pasal 28i

- (3) *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*

Selain memiliki sifat khusus yang dapat membedakan LPD dengan lembaga keuangan lainnya. LPD juga memiliki dasar hukum yang jauh berbeda dengan lembaga - lembaga keuangan lainnya

⁷⁴Pasal 18A dan pasal 18B Undang-undang Dasar Tahun 1945

2. Lembaga Perkreditan Desa Menurut TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Selain di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masyarakat hukum adat juga di atur di dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 yaitu :

J. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam,⁷⁵

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat hukum adat diakui oleh pemerintah begitu pula dengan Lembaga Perkreditan Desa yang ada di Bali merupakan milik desa pakraman, dengan ini Lembaga Perkreditan Desa berhak berdiri sendiri dengan berdasarkan masyarakat hukum adat yang di atur di dalam awig-awig desa pakraman.

3. Lembaga Perkreditan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Perhatian terhadap Lembaga Perkreditan Desa di Bali tidak terlepas dari kemampuan dalam memperoleh laba, selain itu Lembaga Perkreditan Desa membutuhkan dasar hukum yang dapat mempertahankan adanya Lembaga ini, terdapat peraturan di Indonesia sendiri mengatur Lembaga perkreditan

⁷⁵ Pasal 4 Huruf J TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Desa diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi:

“Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan / atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Dari peraturan tersebut lembaga-lembaga perkreditan di desa yang di bentuk oleh desa itu sendiri berubah statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang mana BPR Menurut Undang-undang Perbankan menyatakan :

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran” ⁷⁶

Bank Perkreditan Rakyat juga mempunyai tugas yaitu :

*“a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan denganitu ;”*⁷⁷

⁷⁶ Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁷⁷ Pasal 13 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Dari pasal tersebut Lembaga Perkreditan Desa di Bali tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan di kontrol secara langsung oleh pemerintah karena Lembaga Perkreditan Desa ialah Lembaga yang kegiatannya hanya khusus untuk desa pakraman dan tidak melayani masyarakat diluar desa pakraman, sedangkan BPR adalah lembaga yang dalam berkegiatannya memiliki cangkupan yakni masyarakat umum, dimana keuntungan yang diperoleh dari kegiatan keuangan yang telah diselenggarakan menganut unsur profit perbankan. Dalam Undang-undang Perbankan telah tertera Bentuk Hukum dari Bank Perkreditan Rakyat yaitu:

- a. Perusahaan Daerah ;*
- b. Koperasi ;*
- c. Perseroan Terbatas ;*
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. ”⁷⁸*

Koperasi sama seperti lembaga keuangan lainnya menggunakan pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya, dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sudah jelas berbeda dengan LPD yang menggunakan Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Terlepas dari landasan konstitusional yang berbeda, Koperasi juga memiliki tujuan yang berbeda dengan LPD bila dicermati secara seksama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dapat diketahui bahwa Koperasi didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya

⁷⁸Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

kemudian masyarakat pada umumnya, sedangkan LPD mengemban tujuan memelihara kebudayaan yang ada di Bali serta sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat desa pakraman.

4. Lembaga Perkreditan Desa Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Di negara Indonesia sangat menjunjung tinggi demokrasi dimana salah satunya di bentuk Undang-undang HAM yang terdapat peraturan yang dimana pemerintah menyatakan :

- (1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.*
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.⁷⁹*

Pasal tersebut memberikan kekuatan untuk masyarakat khususnya masyarakat adat yang disini dapat dikaitkan dengan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa yang dimiliki oleh desa pakraman di Bali, yang mana desa pakraman ialah salah satu identitas masyarakat hukum adat di Bali.

5. Lembaga Perkreditan Desa Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Di dalam Undang-undang Pemerintah Daerah diatur peraturan yang mengatur masyarakat hukum adat di Indonesia yang menyatakan :

⁷⁹ Pasal 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

“ Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁸⁰

Hal ini menandakan bahwa masyarakat hukum adat yang mana disini contohnya desa pakraman berhak mendirikan Lembaga Perkreditan Desa dengan adanya peraturan yang lebih khusus yaitu :

“(9) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

6. Lembaga Perkreditan Desa Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Pada tanggal 8 Januari 2013 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM) menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 yang disahkan pada 11 Desember 2012 lalu sebagai dasar hukum dari LKM yang mana Lembaga Keuangan Mikro yaitu ;

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa

⁸⁰Pasal 1 ayat 12 Undang - undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.”⁸¹

LKM didirikan dengan motif untuk menunjang kebutuhan usaha kecil menengah dari masyarakat dengan memberikan pinjaman dengan transaksi-transaksi kecil dan jangka pendek agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan motif pendirian LPD adalah memelihara kebudayaan yang ada di Bali serta sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat desa pakraman dengan dasar hukum Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁸²

Kepemilikan LKM dapat dimiliki oleh siapapun bagi seluruh warga negara Indonesia dan badan usaha milik desa/kelurahan serta pemerintah daerah kabupaten/kota dan atau koperasi, sesuai dengan ketentuan :

“LKM hanya dapat dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. badan usaha milik desa/kelurahan;*
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau*
- d. koperasi.*”⁸³

Berbeda dengan LPD yang berperan sebagai lembaga komunitas desa yang kepemilikannya hanya diperuntukan bagi seluruh masyarakat desa.

⁸¹Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁸²Muhamad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 248

⁸³Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Di dalam Undang-Undang LKM tersebut terdapat peraturan Lembaga Perkreditan Desa yang diakui keberadaannya menurut hukum adat yaitu ;

*“Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini”*⁸⁴

Didalam Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembaga Perkreditan Desa diakui keberadaannya sebagai Lembaga milik desa adat maka dapat diketahui bahwa memang telah lahir era baru bagi keberadaan LPD di Bali, yang patut direspon dengan cara tepat dan cepat. Selain adanya ruang yang cukup kondusif bagi keberadaan dan aktivitas LPD, pemberlakuan Undang-Undang LKM mengharuskan LPD untuk melakukan pembenahan terkait dengan keberadaan (linggih) dan tata kelolanya (sesana), sehingga memenuhi persyaratan sebagai sebuah lembaga keuangan yang keberadaannya diakui berdasarkan hukum adat, seperti ditentukan dalam pasal 39 angka (3) Undang-Undang LKM.

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori

⁸⁴Pasal 39 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-undang Desa yaitu :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁸⁵

Selain di dalam pasal tersebut terdapat Bab XIII yang mengatur ketentuan khusus desa adat dengan adanya Undang-undang ini mendukung

⁸⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

adanya desa adat seperti desa pakraman yang mendirikan Lembaga Perkreditan Desa di Bali khususnya.

8. Lembaga Perkreditan Desa Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa

Berdirinya Lembaga Perkreditan Desa di Bali di atur dalam Peraturan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan yang terbaru yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2017 ini yang menyatakan :

(9) Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman.

Dari pasal tersebut telah jelas bahwa Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Pakraman di dalam desa pakraman dibuat awig-awig yang mana di buat oleh perangkat desa adat di Bali dan di setiap desa pakraman berbeda-beda awig-awig,

C. Eksistensi Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Yang di Bentuk Oleh Masyarakat Hukum Adat

1. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa

Pada awalnya keberadaan dan aktivitas LPD diatur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 tertanggal 1 November 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali. Sebagai Implementasi dari Kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali tersebut di atas, maka secara resmi LPD beroperasi mulai 1 Maret 1985 dan di setiap kabupaten didirikanlah sebuah LPD.

Peraturan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPD, ada perubahan lagi yaitu dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan ada perubahan lagi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa yang mana perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012.

Dalam sejarah perkembangan Lembaga Perkreditan Desa ada beberapa Peraturan Daerah yang menjadi dasar dalam pembentukan Lembaga Perkreditan Desa yaitu;

- a. Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali (Gubernur) Nomor 972 Tahun 1984 mencetuskan gagasan pembentukan LPD pada setiap desa adat , secara garis besar Keputusan tersebut memuat;

Tujuan didirikan LPD ;

- 1) Memberantas ijon, gadai gelap dan lain - lain yang dapat dengan itu.
- 2) Meningkatkan daya beli masyarakat desa.
- 3) Melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa.

- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa, secara garis besar Perda ini memuat ;

Tujuan LPD ;

- 1) Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif.
- 2) Membrantas ijon, gadai gelap, dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu.
- 3) Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan.
- 4) Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Peraturan Daerah ini ditindak lanjuti dengan 5 (lima) Keputusan Gubernur yaitu;

- 1) Keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun 2003 tentang Status dan tugas – tugas Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten/ Kota.
- 2) Keputusan Gubernur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Penyetoran dan Penggunaan Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa.
- 3) Keputusan Gubernur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Dana Perlindungan Lembaga Perkreditan Desa.
- 4) Keputusan Gubernur Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pembina Lembaga Perkreditan Desa Provinsi Bali.

- 5) Keputusan Gubernur Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa.

d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 08 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Perda ini ditindak lanjuti dengan diterbitkannya ;

- 1) Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa.
- 2) Keputusan Gubernur Bali Nomor 11/01 - C/HK/2008 tentang Pembentukan Badan Pembina Umum LPD Provinsi Bali.
- 3) Keputusan Gubernur Bali Nomor 1499/01 - C/HK/2008 tentang Status dan Tugas – tugas Pembina Lembaga Perkreditan Desa Provinsi (PLPDP) Bali dan PLPDK.

2. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Menurut Undang-undang Perbankan dengan Undang- undang Lembaga Keuangan Mikro

Munculnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mana Pada intinya Lembaga Perkreditan Desa dialihkan statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat di dalam Undang-undang Perbankan Sedangkan lain halnya di dalam Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro yaitu Lembaga Perkreditan Desa di akui keberadaannya berdasarkan hukum adat, dari kedua undang-undang ini dapat di terapkan asas-asas perundang-undangan yaitu :

1. Lex Posteriori Derogat Legi Priori

“Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama”

Dilihat dari terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang pada asas ini undang-undang baru diutamakan pelaksanaannya dari pada undang-undang lama yang mengatur hal yang sama, apabila dalam undang-undang baru tersebut tidak mengatur pencabutan undang-undang lama, maka jika memakai asas ini peraturan yang di pakai yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mana di dalamnya di atur mengakui keberadaan Lembaga Perkreditan Desa sesuai hukum adat.

2. Lex Speciale Derogat Legi Generale

“Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum”. Lembaga Keuangan Bank di atur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Lembaga Perkreditan Desa salah satu dari beberapa Lembaga Keuangan Desa di Indonesia yang mana juga termasuk Lembaga Keuangan Mikro yang mana tujuan Lembaga Keuangan Desa dengan Lembaga Keuangan Mikro yaitu sama-sama tidak mencari keuntungan, dan jika dilihat dari sisi lembaga keuangan secara garis besar LKM termasuk Lembaga Keuangan Non Bank, dapat di simpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah peraturan yang lebih khusus mengatur Lembaga-lembaga keuangan yang ada di desa atau lembaga

berkontribusi bagi rakyat kecil di desa, sedangkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu peraturan secara umum mengatur Lembaga Keuangan Bank yang keberadaannya mendominasi di pemukiman perkotaan masyarakat modern. sesuai dengan asas ini suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat di kesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.



Tabel 1. Perlindungan Lembaga Perkreditan Desa

No	Peraturan Perundangan-undangan	Pasal
1	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<p><i>Pasal 18A</i></p> <p><i>(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan ke-khususan dan keragaman daerah.</i></p> <p><i>(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.</i></p>

	<p><i>Pasal 18B</i></p> <p><i>(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.</i></p> <p><i>(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”</i></p> <p><i>Pasal 28i</i></p> <p><i>(4) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.</i></p>
--	--

2	TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	<i>J. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam;</i>
3	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan	<i>“Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan / atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”</i>

4	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	<p><i>Pasal 6 :</i></p> <p><i>(1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.</i></p> <p><i>(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.</i></p>
5	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah	<p><i>“(9) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang</i></p>

		<i>masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>
6	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro	<i>“Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini”</i>
7	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	<i>Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati</i>

		<i>dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</i>
8	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa	<i>(9) Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman.</i>

Sumber :
Peraturan

Perundang-Undangan dan diolah oleh Penulis

Tabel 2. Perbedaan Lembaga Perkreditan Desa dengan BPR, LKM, dan Koperasi

Karakteristik	LPD	BPR	LKM	Koperasi
Landasan Pendirian	Hukum adat/awig-awig	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Inisiatif Pembentukan	Krama/Warga desa adat	Pribadi/Kelompok	Pribadi/Kelompok	Pribadi/Kelompok
Cara Memperoleh Modal	Sumbangan pemerintah dan sumbangan sukarela dari warga desa adat sesuai keikhlasan	Melalui dana dari para pemegang saham dan sektor-sektor lain yang sah	Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan badan hukumnya.	Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 1.Modal sendiri, terdiri dari : simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. 2.Modal pinjaman, terdiri dari : anggota,

				koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya, sumber-sumber lain yang sah
Perangkat Organisasi	Perangkat organisasi LPD : 1.Paruman Desa Pakraman 2.Prajuru atau bendesa adat (ketua badan pengawas) 3.Ketua LPD 4.Kasir 5.Tata Usaha 6.Staff	Perangkat organisasi BPR : 1.Rapat Umum Pemegang Saham 2.Komisaris 3.Direksi 4.Staff-staff pendukung	1.Rapat anggota 2.Pengurus 3.Pengawas	Perangkat organisasi koperasi : 1.Rapat anggota 2.Pengurus 3.Pengawas

Lingkup Wilayah Operasional	Hanya sebatas di lingkungan desa pakraman	Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia	Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia	Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
Orientasi Usaha	Lembaga non-profit, yang bersifat sosio kultural	Profit	Profit	Bersifat profit untuk mensejahterakan anggota-anggotanya
Pembagian Keuntungan	40% untuk pengelolaan modal, 60% untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat desa adat	Pembagian keuntungan diantara para pemegang saham sesuai dengan presentase saham yang dimiliki	Pembagian keuntungan diantara para anggotanya sesuai kesepakatan bersama.	Berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk masing-masing anggota.

Sumber : Ketut Gunawan, Peran Falsafah Tri Hita Karana Bagi Pertumbuhan dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, Analisis

Manajemen, Volume 5, Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti, Singaraja, 2011. Hal.29-32 dan diolah oleh penulis

